

**TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENEGAK HUKUM DALAM
PENGUMPULAN TOL BERBASIS *MULTI LANE FREE FLOW*
DI INDONESIA**

ABSTRAK

Penerapan sistem pengumpulan tol nontunai nirsentuh nirhenti berbasis *Multi Lane Free Flow* (MLFF) di Indonesia merupakan upaya modernisasi infrastruktur transportasi untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas dan pelayanan publik. Namun, implementasi MLFF menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait tumpang tindih kewenangan penegak hukum dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan pembayaran tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penerapan MLFF di Indonesia serta mengkaji bentuk tumpang tindih kewenangan antarlembaga dalam sistem penegakan hukum MLFF, dengan melakukan perbandingan dengan penegakan hukum di Austria dan Hungaria. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan komparatif (*comparative approach*). Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan karya ilmiah, serta diperkuat dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan MLFF di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengatur Jalan Tol, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pembayaran tol berbasis MLFF. Sebagai perbandingan, Austria dan Hungaria telah menerapkan sistem MLFF dengan model otoritas jalan tol terintegrasi yang memiliki kewenangan tunggal dalam pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum, sehingga mampu meminimalisir konflik kewenangan dan meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit kerja spesifik yang terintegrasi guna mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan optimalisasi penerapan MLFF di Indonesia.

Kata Kunci: *Multi Lane Free Flow*, Tumpang Tindih Kewenangan, Penegakan Hukum, dan Jalan Tol.

OVERLAPPING AUTHORITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN MULTI LANE FREE FLOW–BASED TOLL COLLECTION IN INDONESIA

ABSTRACT

The implementation of a contactless, non-stop toll collection system based on Multi Lane Free Flow (MLFF) in Indonesia represents an effort to modernize transportation infrastructure to improve traffic efficiency and public services. However, the implementation of MLFF raises legal issues, particularly concerning overlapping authorities among law enforcement agencies in monitoring and enforcing toll payment compliance. This study aims to analyze the legal framework for MLFF implementation in Indonesia and examine the forms of overlapping authority between institutions within the MLFF law enforcement system, by making comparisons with law enforcement in Austria and Hungary. The research method employed is a normative-empirical juridical approach, using statutory (statute approach), conceptual (conceptual approach), and comparative (comparative approach) methods. Data were obtained through a literature study of legislation, legal documents, and scholarly works, and were supplemented with interviews as supporting data. The results indicate that MLFF regulation in Indonesia remains sectoral and is not yet integrated, leading to unclear authority among the Indonesian National Police, the Toll Road Regulatory Agency, financial institutions, and technology providers. This situation affects legal certainty and the effectiveness of law enforcement concerning MLFF-based toll payment violations. In comparison, Austria and Hungary have implemented MLFF systems with an integrated toll authority model that possesses sole authority in management, supervision, and law enforcement, thereby minimizing conflicts of authority and enhancing road user compliance. This study concludes that regulatory harmonization and institutional strengthening through the establishment of a specific, integrated work unit are necessary to ensure legal certainty, effective law enforcement, and the optimal implementation of MLFF in Indonesia.

Keywords: *Multi Lane Free Flow, Overlapping Authority, Law Enforcement, and Toll Roads.*